



► REVITALISASI PASAR TERBAN

Pedagang Minta Ada Dialog Ulang

UMBULHARJO—Relokasi pedagang tanpa proses komunikasi yang setara berpotensi memutus keberlanjutan usaha yang telah bertahan selama puluhan tahun. Kekhawatiran itu mendorong pedagang di Jalan Jenderal Sudirman mengadu ke DPRD Kota Jogja, Selasa (20/1). Mereka menolak skema relokasi ke Pasar Terban yang dinilai belum mempertimbangkan realitas lapangan.

Kelompok pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Kios Jenderal Sudirman menyatakan keberatan atas rencana pemindahan ke Pasar Terban. Mereka menilai lokasi pengganti tidak selaras dengan karakter usaha jasa dan kuliner yang selama ini dijalankan di koridor tersebut.

Ketua Paguyuban Kios Jenderal Sudirman, Darsam, menuturkan akses Pasar Terban menjadi persoalan mendasar. Berbeda dengan kios di Jalan Jenderal Sudirman yang telah ditempati puluhan tahun, pasar tersebut berada di jalur satu arah yang dinilai kurang mendukung aktivitas usaha berbasis jasa dan makanan.

“Mayoritas kami penyedia jasa dan makan, jadi kurang memungkinkan [untuk pindah ke Pasar Terban]. Kami juga sudah puluhan tahun berjualan di sini, bahkan ada yang

sampai 50 tahun,” ujarnya di DPRD Jogja, Selasa.

Selain akses, pedagang menyoroti tata ruang Pasar Terban. Area kuliner yang berdekatan dengan tempat penyembelihan hewan dikhawatirkan menimbulkan bau, sementara ketiadaan eskalator dinilai memberatkan pedagang lanjut usia yang harus membawa peralatan usaha. “Penataan tempatnya tidak cocok,” katanya.

Darsam menambahkan, sejak awal pedagang tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan peruntukan lantai dua Pasar Terban. Akibatnya, kios yang disiapkan dianggap seragam dan tidak menyesuaikan jenis usaha.

Paguyuban mengajukan dua opsi kepada pemerintah. *Pertama*, meminta ganti rugi jika relokasi tetap dilakukan. *Kedua*, apabila pemindahan tidak dapat dihindari, pedagang berharap ditata ulang di lokasi lama agar lebih rapi dan asri.

Menanggapi aduan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kota Jogja, Oleg Yohan, akan berkomunikasi dengan Pemkot Jogja. Ia mengakui lahan yang ditempati pedagang berstatus tanah negara, namun aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama. “Ada nilai kemanusiaannya,” katanya.

(Ariq Fajar Hidayat)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005